**DAMPAK SANKSI NUKLIR IRAN TERHADAP HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN IRAN**

**Ladies Lathifah[[1]](#footnote-1)**

*Abstract:* *This research aims to review and described the impact of iran nuclear sanctions against the united states and iran. The methodology used the kind of research. DescriptiveThe kind of data used that is secondary data. Techniques in data analysis techniques skripsi this is the author analyzing data qualitative analysis secondary and using the theory and concept which can be used to describe a phenomenon or occurrence who is in minutely. The research results show that the impact of nuclear sanctions against the relationship the united states and iran is becoming increasingly troubled relations the two countries and absence of confidence to improve relations between the countries two the emergence of new bilateral sanctions on iran, but iran is always gave full access to its nuclear installation checking, including assigning all the reports required. Application of technology with all kekhususannya iran nuclear for meet all the needs of the people, primarily to energy, but the united states still regard iran run nuclear weapons and have not produced a deal back in terms of the iran nuclear program.*

***Keywords: Impact, Nuclear Sanctions The Relationship.***

**Pendahuluan**

Dalam perkembangan dunia Internasional dengan semakin majunya negara-negara besar, kepemilikan nuklir sudah menjadi keharusan untuk negara-negara maju sebagai tanda kebesaran negara tersebut. Negara dengan nuklir akan menjadi negara dengan kekuatan baru dan akan menjadi ancaman untuk negara-negara yang tidak memiliki nuklir, namun keberadaan nuklir yang tidak menyebar secara global menyebabkan persaingan tersendiri antara negara-negara pemilik nuklir, setiap negara menjadi saling meningkatkan kewaspadaan kepada negara pemilik nuklir untuk mengantisipasi serangan nuklir kepada negara mereka. Di samping meberikan keamanan pada negara, kepemilikan nuklir oleh negara lainya dapat memberikan rasa tidak aman bagi negara tersebut. Berkaitan dengan isu mengenai nuklir, salah satu agenda Amerika Serikat adalah menghentikan program proliferasi nuklir milik Iran. (radioaustralia.net, 2020).

Pada awalnya program nuklir Iran ini dimulai pada masa kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlevi dengan bantuan dari Amerika Serikat. Program pengembangan nuklir Iran dalam tahapannya telah memalui proses panjang. Diawali dengan melakukan kerjasama eishenhower plan dengan Amerika Serikat. Terkait atom untuk perdamaian di tahun 1956. Selanjutnya, pada tahun yang sama Iran mendirikan Teheran Nuclear Research Center (TNRC). Kemudian Iran juga menyetujui menandatangai Non proliferation Treaty (NPT) pada 1968 dan mulai diratifikasi pada tahun 1970, dimana NPT adalah perjanjian untuk menggunakan energi nuklir dengan tujuan yang damai dan tidak memproduksi senjata nuklir. (nti.org, 2020).

Karena sebelum adanya perjanjian (JCPOA) Amerika Serikat banyak memberikan sanksi ekonomi guna menekan iran sejak lama, sanksi ekonomi pertama kali bagi Iran dijatuhkan pada November 1979 itu merupakan hukuman atas tindakan sekelompok mahasiswa radikal yang menyerbu Kedutaan Besar AS di Tehran dan menyandra sejumlah orang di dalam kedubes. Sanksi ini ditetapkan dengan Executive Order 12170 (Perintah Presiden 12170) yang berisi antara lain untuk membekukan aset-aset Iran senilai US$ 12 Miliar, termasuk deposito di perbankan, emas, dan properti, tetapi sanksi ini di hapuskan pada 1981 ketika para sandra di bebaskan. (katadata.co.id, 2020).

Sanksi selanjutnya ketika pecah perang Iran-Irak dipicu oleh invasi ke Iran pada 22 September 1980, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran. Amerika Serikat melarang penjualan senjata dan bantuan apapun kepada Iran. Menurut Unitied States Institute of Peace, sanksi tersebut diberikan karena Iran dianggap mendukung tindakan terorisme dan berambisi membuat senjata pemusnah massal berupa senjata nuklir (katadata.co.id, 2020).

Pada saat Iran mengaktifkan kembali program pengayaan uranium di bawah kepemimpinan Presiden Ahmadinejad pada 2005. Presiden AS George W. Bush pun mengeluarkan Executive Order 13382 untuk membekukan aset-aset individu yang terkait dengan program nuklir Iran. Gedung Putih bahkan membuat unit khusus di bawah Departemen Keuangan AS untuk memastikan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran memiliki efek yang dahsyat. Beberapa entitas perusahaan asing dari Tiongkok dan Rusia juga terdampak sanksi ekonomi AS karena ketahuan membantu program nuklir Iran. (katadata.co.id, 2020).

Di samping itu, Presiden Barack Obama juga membebaskan Iran dari beberapa sanksi ekonomi yang telah diberikan Amerika Serikat untuk menekan Iran. Dengan pembebasan sanksi ekonomi tersebut hubungan Amerika Serikat dan Iran mulai membaik, adapun dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti Dampak Sanksi Nuklir Iran terhadap Hubungan Amerika Serikat dan Iran.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Sanksi Internasional***

Sanksi Internasional adalah tindakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lainnya atas alasan politik, baik secara unilateral atau multilateral. Terdapat beberapa jenis sanksi.:

1. Sanksi diplomatik, pengurangan atau penghapusan hubungan diplomatik, seperti kedubes.
2. Sanksi ekonomi, biasanya pencekalan pada perdagangan, mungkin terbatas pada sektor tertentu seperti persenjataan atau dengan pengecualian tertentu (seperti makanan dan pengobatan)
3. Sanksi militer, keterlibatan militer
4. Sanksi olahraga – menghindarkan orang atau tim dari suatu negara dari perlombaan dalam acara-acara internasional
5. Sanksi lingkungan hidup, sejak deklarasi Konferensi Perserikatan tentang Lingkungan Hidup Manusia, upaya perlindungan lingkungan hidup internasional makin ditingkatkan.
6. Sanksi ekonomi berbeda dengan sanksi dagang, yang ditujukan untuk alasan ekonomi murni, dan biasanya mengambil bentuk tarif atau ukuran serupa, ketimbang pencekalan dagang

Sanksi Internasional atas pelanggaran HAM adapun sanksi yang biasa di terapkan bagi negara pelanggar HAM antara lain:

1. Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya. Ini akan berakibat langsung seperti wisatawan menjadi sepi dan juga terjadi penundaan berbagai transaksi dagang, dan hal ini akan merugikannya.
2. Pengalihan Investasi atau penanaman modal asing. Hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan menjadikan rasa aman penanam modal di suatu negara.
3. Pemutusan hubungan diplomatic lazimnya hal itu dimulai dari pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, maka akan sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yakni asas timbal balik.
4. Pengurangan bantuan ekonomi dapat dilakukan secara sendiri-sendir oleh suatu negara atau mengajak negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurangi bantuan terhadap negar tersebut.
5. Pengurangan tingkat kerjasama, pengurangan kerja sama antar negara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antar negara dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerjasama antar negara.
6. Pemboikotan Produk Ekspor ketidaksenangan pemerintah suatu negara dapat dimanifestasikan dalam bentuk penolakan terhadap produk industri atau barang perdagangan dari negara tertentu. Secara teknis dapat dilakukan tindakan proteksi dengan cara legal formal menaikkan tarif pajak masuk bagi barang dagangan dari negara lain.
7. Embargo ekonomi, embargo ekonomi adalah suatu upaya untuk menekan suatu negara yang dianggap menentang keputusan atau kebijakan bersama. Yakni, dengan cara melarang masuknya berbagai barang yang dianggap perlu, agar negara yang diembargo mengubah kebijakan nasionalnya sesuai dengan keinginan negara pengembargo.
8. Kesepakatan organisasi regional/ internasional apabila suatu negara dianggap telah melanggar kesepakatan (konvensi) internasional termasuk pelanggaran HAM, organisasi regional atau internasional dapat menetapkan sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran tersebut.

Definisi dari sanksi ekonomi banyak dijelaskan oleh beberapa ahli. Menurut Robert Eyler, sanksi ekonomi adalah tindakan diplomatik yang digunakan untuk mengubah kebijakan politik pemerintah asing, dimana sanksi bertindak seolah-olah sebagai kebijakan makroekonomi yang mentransmisikan efek ekonomi koersif pengirim ke target. Sanksi ekonomi juga didefinisikan oleh Johan Galtung sebagai tindakan satu atau lebih aktor internasional (*sender*) terhadap satu atau lebih aktor internasional yang lain (*receiver*) dengan tujuan yaitu menghukum dan/atau memaksa untuk tunduk pada norma yang dianggap penting. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi ekonomi merupakan instrumen kebijakan luar negeri pemerintah asing yang menggunakan sektor ekonomi sebagai alat untuk memaksa negara tujuan untuk tunduk ataupun mengubah kebijakan negaranya.

Dalam hal ini, sanksi ekonomi dapat terdiri dari beberapa bentuk seperti halnya pembatasan impor atau ekspor, pembatasan investasi, termasuk didalamnya arus modal bahkan, mencakup pelarangan investasi dinegara yang dikenai sanksi (negara target). Sanksi ekonomi juga dapat dalam bentuk yang lebih spesifik atau dikenal dengan sebutan ”Smart Sanction‟ yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap individu yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran norma internasional. Smart sanction terdapat dalam beberapa bentuk antara lain embargo militer, sanksi financial, larangan bepergian ke luar negeri, pembekuan aset diluar negeri, dan pembatasan pembelian barang-barang tertentu.

Klasifikasi sanksi ekonomi dapat dilihat dari klasifikasi sanksi menurut Galtung sebagai berikut.

1. Sanksi baik sebagai (positif) ataupun hukuman (negatif).

2. Sanksi ditujukan untuk individu atau kolektif.

3. Sanksi dikenakan karena tindakan internal atau eksternal oleh target.

4. Sanksi bersifat unilateral, multilateral atau universal.

5. Sanksi bersifat umum atau kolektif.

6. Sanksi bersifat total atau parsial.

7. Sanksi membatasi campuran perdagangan, pembiayaan, komunikasi dan hubungan diplomasi target.

Sanksi ekonomi seringkali digunakan untuk menghukum negara yang dianggap melanggar norma-norma internasional seperti halnya HAM. Meskipun begitu, sanksi ekonomi juga menyimpan paradoks. Sanksi yang biasanya dibuat dengan alasan penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut, justru memicu adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Sebab, kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh isolasi ataupun pembatasan dari sanksi ekonomi akan membuat banyak warga sipil menderita terutama pada rakyat miskin. Sanksi ekonomi dapat menyebabkan kelaparan atau malnutrisi, wabah penyakit, kehilangan pekerjaan, hilangnya hak pendidikan dan lain sebagainya.

**Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian *deskriptif* yaitu menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian melalui semua sumber data yang diperoleh dari literatur yang digunakan dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka *(library research).* Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik kualitatif dimana informasi yang diperoleh diruangkan dalam bahasa yang dapat menjelaskan hubungan antara data satu dengan data lainnya sehingga dapat diperoleh kebenaran atas informasi tersebut.

**Hasil Penelitian**

***Dampak Sanksi Terhadap Hubungan Amerika Serikat dan Iran***

***Tahun 2000-2009***

Dampak dari perkembangan kemampuan Iran dalam mengolah uranium membuat Iran mendapat kecaman yang keras dari presiden George W. Bush. Ia mengancam akan menyerang Iran dengan kekuatan militer jika Iran tidak mau menghentikan pengembangan nuklirnya. Amerika juga berusaha mengajak negara-negara eropa dan PBB untuk memberikan sanksi yang lebih ketat kepada Iran. melihat dampak sanksi embargo yang mulai mempengaruhi perekonomian Iran secara drastis membuat Iran mulai membuka dialog diplomasi untuk program nuklirnya yang kemudian pada 7 November 2004 setelah melewati 22 jam negosiasi, Iran akhirnya menyetujui untuk menghentikan sementara aktivitas pengembangan nuklirnya.

Dialog mengenai nuklir iran berjalan hingga pertemuan dialog selanjutnya dengan negara negara uni eropa. Hubungan diplomatik yang dijalankan Iran cenderung mengarah kepada negara-negara EU-3 seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Besarnya tekanan terhadap Iran dari dunia Internasional membuat Iran mau tidak mau harus mendekatkan diri agar sanksi yang diterimanya dapat di minimalisir.

Usaha Iran untuk mendapatkan keringanan menemui kendala. Hal ini dikarenakan pada tanggal 1 Agustus 2005 Iran tidak menandatangani proposal perjanjian jangka panjang dengan EU-3 dikarenakan isi perjanjian yang berbeda dengan proposal yang telah di ajukan Iran sebelumya. Iran merespon dengan batalnya perjanjian tersebut dengan melakukan aktifitas konversi uranium di Eshfahan. Kegiatan konversi uranium tersebut kembali mendapat kecaman keras dari Amerika. Sekali lagi Amerika dan sekutunya menuduh Iran mencba mengembangkan nuklir untuk kepentingan militer dan membuat bom nuklir. Namun semua sanksi dan tuduhan yang dialamatkan kepada Iran tidak membuat Iran menghentikan program nuklirnya. Iran menanggapi semua isu tersebut dengan dingin dan sebaliknya, Iran menantang Amerika dan sekutunya dengan menunjukkan uji coba rudal ballistic dan mengembangkan dan membangun fasilitas-fasilitas nuklir dengan teknologi baru yang berhasil dikembangkan oleh Iran.

Pada desember 2006 Iran kembali melanjutkan produksi uraniumnya di fasilitas nuklir Natanz. Sebagai reaksinya dewan keamanan PBB menyetujui untuk memberikan sanksi terhadap nuklir Iran. sanksi tersebut berisi embargo terhadap export dan impor material dan teknologi yang di gunakan untuk memperkaya uranium dan produksi rudal balistik Iran. diberlakukannya sanksi ini membuat pengembangan nuklir Iran menjadi terhambat akibat kurangnya distribusi material yang digunakan untuk memperkaya uranium milik Iran. selain itu pembekuan aset terhadap 12 warga negara Iran dan 10 perusahaan yang terlibat dalam program nuklir dan rudal balistik Iran. Hingga sekarang Iran dicurigai memiliki banyak sekali fasilitas pendukung pengembangan program nuklir seperti pada gambar map berikut.

Pada 19 july 2008 dialog antara negara p5+1 menemui jalan buntu. Dimana Iran tetap bersikeras untuk menjalankan program nuklirnya. Dialog dengan negara p5+1 tersebut menawarkan jika Iran menghentikan program nuklirnya maka sebagai gantinya sanksi embargo terhadap Iran akan di ujicoba pencabutan selama kurang lebih 6 minggu. Serta memberikan insentif di bidang politik dan ekonomi jika Iran bersedia menghentikan program pengayaan nuklirnya.

Pada 29 september 2009 presiden Obama dan aliansinya menggunakan penemuan fasilitas pengayaan uranium rahasia untuk menyerang Iran. Obama berusaha menunjukan pada aliansinya bahwa Iran secara diam-diam membangun fasilitas nulkir jauh di dalam terowongan pegunungan. Berdasarkan info dari intelegence Amerika, Obama menyebutkan bahwa fasilitas tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pengembangan senjata. Sejak 2007 Iran tercatat memiliki tingkat pengembangan jumlah inti nuklir yang meningkat sangat tajam, hal inilah yang menjadi kekhawatiran dunia internasional terutama Amerika yang mencurigai pengembangan nuklir oleh Iran didasari oleh kepentingan militer.

Selanjutnya pada periode pertama Obama menjabat sebagai presiden Amerika, Obama menginstruksikan secara rahasia untuk meningkatkan serangan cyber terhadap system computer yang digunakan Iran pada fasilitas utama pengayaan nuklir Iran. Dimana hal ini merupakan pertama kalinya bagi Amerika untuk melakukan serangan cyber secara berkelanjutan terhitung dari jumlah aksi serangan yang dilakukan. Cyberattack ini diberi nama Olympic Games oleh administrasi Bush meskipun pada 2010 kegiatan serangan cyber yang di lakukan Amerika mampu dideteksi Iran dan mempublikasikannya lewat internet.

Selanjutnya pada 10 juni 2010, Amerika menyetujui untuk memberikan sanksi embargo baru terhadap Iran. sanksi tersebut meliputi embargo pembelian senjata militer, perdagangan dan transaksi finansial yang di gunakan oleh para pegawai revolusioner islam Iran yang bertugas mengontrol program nuklir Iran. Amerika juga mewajibkan setiap negara yang memiliki hubungan dengan Iran untuk menginspeksi kapal atau pesawat yang datang maupun meninggalkan Iran untuk menemukan kargo yang mencurigakan.

Pada tanggal 1 Juli 2010, Presiden Obama mengesahkan Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA), yang secara signifikan berhubungan dengan aktivitas energi yang di jatuhi sanksi pada program Iran Sanctions Act (ISA). CISADA memilki beberapa tipe sanksi tambahan, program baru ini menangani hubungan potensial antara sektor energi Iran dengan program nuklirnya yang di sorot dalam resolusi 1929 DK PBB.

CISADA mendukung upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran untuk bersedia melakukan perundingan diplomatik terkait dengan kekhawatiran dunia internasional mengenai NPT, dan pengawasan IAEA. AS memutuskan untuk menjalankan ISA sepenuhnya dan otoritas lainya di dalam CISADA sebagai tambahan untuk meyakinkan pemerintah Iran mengubah perhitungan strategisnya, sesuai aturan wajib pengembangan nuklir, dan bersedia untuk membangun negosiasi yang konstruktif di masa depan tentang program nuklirnya.

CISADA merupakan peraturan ekstra-teritorial.Warga AS telah di larang melakukan bisnis di Iran selama lebih dari satu dekade. Melalui sanksi ini, AS memiliki kemampuan untuk menargetkan sanksi kepada perusahaan asing dan anak perusahaan dari perusahaan-perusahaan AS. Menurut ketentuan CISADA, setiap perusahaan yang ditemukan melanggar undang-undang akan dikenakan setidaknya tiga dari sembilan menu sanksi.

***Tahun 2010-2018***

Hubungan Iran-Amerika mulai menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada 2013 dimana untuk pertamakalinya presiden terpilih Iran Hasan Rouhani menelfon Barack Obama ketika berkunjung ke forum PBB di New York yang mana ini merupakan komunikasi pertama yang terjalin setelah 30 tahun meregangnya hubungan bilateral kedua negara. Hubugan baik tersebut berlanjut dan memberikan sinyal positif bahwa Iran akan membuka dialog untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya, hal ini dibuktikan dengan Iran yang pada 24 November 2013 menghadiri perundingan dengan negara-negara P5+1 di Geneva, Switzerland yang kemudian diimplementasikan pada dialog final JCPOA pada tahun 2015. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Iran, AS, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris. Kesepakatan itu sangat membatasi kapasitas Iran untuk memperkaya uranium dan mengamanatkan agar pengawas internasional memantau dan menegakkan kepatuhan Iran dengan perjanjian tersebut.

Setelah kesepakatan di Wina pada tahun 2016 IAEA memverifikasi bahwa Iran telah memathui segala isi dari kesepakatan dengan negara P5+1. Membuat iran leluasa untuk bersaing dalam perekonomian internasional. Iran sendiri dapat menggenjot kembali ekspor minyak yang sebelumnya terus di batasi saat sanksi sedang berlangsung. dampak dari pencabutan sanski mengalirnya penawaran kerjasama dan investasi di berbagai bidang industri yang dimiliki Iran dari negara-negara dunia. Hal ini tersebut tentu akan meningkatkan perekonomian domestik Iran.

Tak semua negara menyambut baik pencabutan sanksi Iran, negara sekutu AS, Israel justru masih menaruh curiga terhadap Iran. Israel masih menganggap Iran akan menjadi ancaman terbesar di kawasan Timur Tengah. Terlebih pasca pencabutan sanksi Iran dianggap akan semakin meningkatkan kemampuanya dalam mengembangkan program nuklir untuk menciptakan senjata pemusnah masal,

Selain Israel, sekutu AS lainya yaitu Arab Saudi menaruh reaksi sinis terhadap pencabutan sanksi Iran. Iran dianggap akan mencoba mendominasi kawasan Timur Tengah dengan segala kekuatannya. Arab saudi mengkhawatirkan pengaruh Iran di Timur Tengah akan lebih leluasa pasca pencabutan sanksi. Bahkan Arab Saudi menunjutkan sikap kecewa terhadap AS yang mencabut sanksi-sanksi Iran.

Terlepas dari berbagai reaksi dari berbagai negara, Hassan Rouhani berhasil membuat Iran keluar dari periode-periode sulit. Dukungan pemimpin tertinggi dan rakyat Iran berhasil membuat Iran lepas dari berbagai belenggu sanksi yang membuat kondisi perekonomian domestik terguncang. Berbagai reaksi sinis dari sekutu Amerika Serikat ditanggapi dingin oleh Iran yang menegaskan bahwa pencabutan sanksi guna memperbaiki kondisi internal Iran bukan untuk memperluas pengaruh, karena Iran bukanlah negara agresor layaknya Amerika Serikat

Terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin baru Amerika Serikat membawa kebijakan baru terkait isu nuklir Iran. Pada 8 Mei 2018 Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari kesepakatan nuklir dan memutuskan untuk kembali menerapkan sanksi terhadap Iran. Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran merupakan keputusan sepihak yang tidak melibatkan para anggota penandatangan kesepakatan lainnya. Kesepakatan itu masih dipandang oleh negara-negara lain sebagai cara terbaik untuk mencegah Iran menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan nuklir, meskipun mereka mengakui bahwa kesepakatan yang sudah terbentuk masih belum sempurna. Meski mendapat dukungan dari sekutunya di Timur Tengah, kebijakan Amerika Serikat yang kontroversial ini ditentang oleh banyak pihak, termasuk negara yang terlibat dalam kesepakatan. Bahkan tanpa Amerika Serikat negara penandatangan masih berkomitmen untuk melanjutkan kesepakatan sebab tidak ingin membiarkan Iran lepas kendali

Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan membuat kesepakatan nuklir Iran berada dalam posisi yang rentan. Pihak penandatangan yang masih bertahan dituntut untuk dapat melindungi Iran dari sanksi yang kembali diterapkan Amerika Serikat. Di sisi lain Iran semakin mempertegas pendiriannya bahwa kesepakatan nuklir Iran adalah kesepakatan yang tidak bisa lagi dinegosiasikan. Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kini membawa konsekuensi langsung terhadap ancaman Iran yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah, kondisi ini semakin meningkatkan eskalasi konﬂik kawasan.

Kekhawatiran yang menjadi polemik dalam JCPOA adalah bahwa Iran akan menggunakan keringanan sanksi untuk membangkitkan kembali ekonominya. Iran dianggap tidak mungkin melepaskan status hegemon regionalnya sekalipun Iran ingin memprioritaskan manfaat ekonomi dari perdagangan minyak dalam jangka pendek, perdagangan ini kemungkinan besar akan dieksploitasi untuk kepentingan politik dalam jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, Iran juga berhasil untuk tetap menjaga program nuklirnya pada tingkat yang tinggi sehingga kemudian membuat JCPOA berjalan tidak seimbang. Iran terlihat sebagai pihak yang lebih unggul dan diuntungkan sebab setelah JCPOA berakhir, negara tersebut berpotensi untuk mendapatkan senjata pemusnah masal (weapon of mass destruction/WMD) dan pada saat itu, ekonominya akan berada dalam kondisi yang lebih baik dan pengaruh regionalnya bahkan lebih besar sehingga kesepakatan itu pada akhirnya akan menguntungkan Iran secara sepihak. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 19 September 2017 . Hubungan Iran-Amerika mulai menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada 2013 dimana untuk pertamakalinya presiden terpilih Iran Hasan Rouhani menelfon Barack Obama ketika berkunjung ke forum PBB di New York yang mana ini merupakan komunikasi pertama yang terjalin setelah 30 tahun meregangnya hubungan bilateral kedua negara Hubugan baik tersebut berlanjut dan memberikan sinyal positif bahwa Iran akan membuka dialog untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya, hal ini dibuktikan dengan Iran yang pada 24 November 2013 menghadiri perundingan dengan negara-negara P5+1 di Geneva, Switzerland yang kemudian diimplementasikan pada dialog final JCPOA pada tahun 2015. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Iran, AS, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris kesepakatan itu sangat membatasi kapasitas Iran untuk memperkaya uranium dan mengamanatkan agar pengawas internasional memantau dan menegakkan kepatuhan Iran dengan perjanjian tersebut.

Setelah kesepakatan di Wina pada tahun 2016 IAEA memverifikasi bahwa Iran telah memathui segala isi dari kesepakatan dengan negara P5+1. Membuat iran leluasa untuk bersaing dalam perekonomian internasional. Iran sendiri dapat menggenjot kembali ekspor minyak yang sebelumnya terus di batasi saat sanksi sedang berlangsung. Dampak dari pencabutan sanski mengalirnya penawaran kerjasama dan investasi di berbagai bidang industri yang dimiliki Iran dari negara-negara dunia. Hal ini tersebut tentu akan meningkatkan perekonomian domestik Iran.

Tak semua negara menyabut baik pencabutan sanksi Iran, negara sekutu AS, Israel justru masih menaruh curiga terhadap Iran. Israel masih menganggap Iran akan menjadi ancaman terbesar di kawasan Timur Tengah. Terlebih pasca pencabutan sanksi Iran dianggap akan semakin meningkatkan kemampuanya dalam mengembangkan program nuklir untuk menciptakan senjata pemusnah masal,

Selain Israel, sekutu AS lainya yaitu Arab Saudi menaruh reaksi sinis terhadap pencabutan sanksi Iran. Iran dianggap akan mencoba mendominasi kawasan Timur Tengah dengan segala kekuatannya. Arab saudi mengkhawatirkan pengaruh Iran di Timur Tengah akan lebih leluasa pasca pencabutan sanksi. Bahkan Arab Saudi menunjutkan sikap kecewa terhadap AS yang mencabut sanksi-sanksi Iran.

Terlepas dari berbagai reaksi dari berbagai negara, Hassan Rouhani berhasil membuat Iran keluar dari periode-periode sulit. Dukungan pemimpin tertinggi dan rakyat Iran berhasil membuat Iran lepas dari berbagai belenggu sanksi yang membuat kondisi perekonomian domestik terguncang. Berbagai reaksi sinis dari sekutu Amerika Serikat ditanggapi dingin oleh Iran yang menegaskan bahwa pencabutan sanksi guna memperbaiki kondisi internal Iran bukan untuk memperluas pengaruh, karena Iran bukanlah negara agresor layaknya Amerika Serikat

Terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin baru Amerika Serikat membawa kebijakan baru terkait isu nuklir Iran. Pada 8 Mei 2018 Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari kesepakatan nuklir dan memutuskan untuk kembali menerapkan sanksi terhadap Iran. Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran merupakan keputusan sepihak yang tidak melibatkan para anggota penandatangan kesepakatan lainnya. Kesepakatan itu masih dipandang oleh negara-negara lain sebagai cara terbaik untuk mencegah Iran menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan nuklir, meskipun mereka mengakui bahwa kesepakatan yang sudah terbentuk masih belum sempurna . Meski mendapat dukungan dari sekutunya di Timur Tengah, kebijakan Amerika Serikat yang kontroversial ini ditentang oleh banyak pihak, termasuk negara yang terlibat dalam kesepakatan. Bahkan tanpa Amerika Serikat negara penandatangan masih berkomitmen untuk melanjutkan kesepakatan sebab tidak ingin membiarkan Iran lepas kendali

Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan membuat kesepakatan nuklir Iran berada dalam posisi yang rentan. Pihak penandatangan yang masih bertahan dituntut untuk dapat melindungi Iran dari sanksi yang kembali diterapkan Amerika Serikat. Di sisi lain Iran semakin mempertegas pendiriannya bahwa kesepakatan nuklir Iran adalah kesepakatan yang tidak bisa lagi dinegosiasikan. Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kini membawa konsekuensi langsung terhadap ancaman Iran yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah, kondisi ini semakin meningkatkan eskalasi konﬂik kawasan.

Kekhawatiran yang menjadi polemik dalam JCPOA adalah bahwa Iran akan menggunakan keringanan sanksi untuk membangkitkan kembali ekonominya. Iran dianggap tidak mungkin melepaskan status hegemon regionalnya sekalipun Iran ingin memprioritaskan manfaat ekonomi dari perdagangan minyak dalam jangka pendek, perdagangan ini kemungkinan besar akan dieksploitasi untuk kepentingan politik dalam jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, Iran juga berhasil untuk tetap menjaga program nuklirnya pada tingkat yang tinggi sehingga kemudian membuat JCPOA berjalan tidak seimbang. Iran terlihat sebagai pihak yang lebih unggul dan diuntungkan sebab setelah JCPOA berakhir, negara tersebut berpotensi untuk mendapatkan senjata pemusnah masal (weapon of mass destruction/WMD) dan pada saat itu, ekonominya akan berada dalam kondisi yang lebih baik dan pengaruh regionalnya bahkan lebih besar sehingga kesepakatan itu pada akhirnya akan menguntungkan Iran secara sepihak. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 19 September 2017 .

Iran dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang erat sejak lama. Berbagai macam bentuk kerjasama kedua negara ini telah lakukan, seperti hubungan diplomatik, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan kedua negara ini semakin renggang dan semakin panas diakibatkan oleh adanya upaya pengembangan program nuklir yang dimiliki Iran. Amerika Serikat tentunya sangat khawatir dengan program nuklir tersebut, mereka beranggapan bahwa program ini akan mengancam kepentingan nya di Timur Tengah. Kemudian, Amerika Serikat juga mengklaim bahwa program nuklir Iran itu akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan dunia internasional.

Iran sebagai negara yang memiliki banyak bahan mentah nuklir, tentunya tidak diam saja mereka memanfaatkan hal tersebut dengan terus mengembangkan program nuklir nya demi kemajuan dan untuk menopang perekonomian Iran. Tidak dapat dipungkiri, program nuklir ini telah mampu mengantarkan perekonomian Iran menuju kesuksesan dalam dunia internasional khusus nya di Timur Tengah. Namun, Niat dan tujuan baik Iran justru mendapat respon negatif oleh beberapa negara salah satunya adalah Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Uni Eropa. Amerika Serikat menganggap itu semua sebagai ancaman bagi Amerika Serikat sendiri dan dunia internasional pada umumnya. Meskipun, sudah keluar pernyataan dari Pemerintahan Iran sendiri terkait nuklir tersebut bertujuan untuk kedamaian dan kesejahteraan rakyat Iran saja, tidak ada tujuan untuk mengancam dan membahayakan dunia internasional seperti yang dituduhkan oleh Amerika Serikat. Tapi, itu semua dibantah dan tidak terlalu dihiraukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, mereka tetap tidak senang dan menganggap itu semua akan membahayakan dunia internasional.

Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan sanksi embargo minyak terhadap Iran. Ini merupakan langkah nyata yang diambil oleh Amerika Serikat untuk menekan agar Iran menutup dan menghentikan program nuklirnya. Sanksi yang diberikan Amerika Serikat tentunya sangat berdampak bagi seluruh rakyat Iran. Berbagai macam akses perekonomian seakan susah untuk dinikmati oleh rakyat Iran.

Ruang gerak perekonomian Iran sangat terbatas karena adanya sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat. Sanksi ini sebenarnya bukan kali pertama didapatkan oleh Iran, namun sebelumnya sudah pernah diberlakukan sanksi oleh Amerika Serikat. Namun, kali ini sanksi lebih berat karena Amerika Serikat banyak mendapat dukungan dari berbagai negara yaitu negara-negara Uni Eropa.

Selanjutnya, dalam mengatasi sanksi tersebut Iran menggunakan strategi akomodatif pada pemerintahan Rouhani berupaya untuk membangun diplomasi ke berbagai pihak untuk mengatasi sanksi embargo sekaligus upaya mempertahankan situasi perekonomiannya. Iran melakukan diplomasi untuk dapat menstabilkan situasi perekonomian dengan negara-negara P5+1. Akhirnya disepakati dan Iran mendapatkan apa yang menjadi keinginan nya yaitu dihentikan sanksi terhadap Iran untuk jangka waktu yang terbilang cukup singkat dan dengan persyaratan yang harus dipatuhi oleh Iran.

Walaupun program nuklir Iran berada di bawah pengawasan IAEA dan Iran telah menandatangani NPT, tidak membuat Iran terhindar dari tekanan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Namun, sanksi tersebut tidak mengubah kebijakan Presiden Ahmadinejad dalam upaya pengembangan teknologi nuklir sipilnya. Dalam menjalankan diplomasinya kepada IAEA, Iran selalu memberikan akses penuh terhadap pemeriksaan instalasi nuklirnya, termasuk memberikan semua laporan yang dibutuhkan. Penerapan teknologi nuklir Iran dengan segala kekhususannya memang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, utamanya untuk energi. Dalam berbagai pemeriksaan, kunjungan dan dialog, IAEA sendiri mengakui hal ini.

Karenanya, diplomasi Iran terhadap IAEA dapat dikatakan berhasil, meski dalam hal berhubungan baik dengan Amerika Serikat dan PBB, Iran mengalami kegagalan.

Secara substansial terkait dengan hasil peneliti lakukan bahwasannya AS memiliki kepentingan terhadap Iran dan begitupun sebaliknya, hal ini dapat menjadi dorongan bagi negara lain untuk melihat sisi positif dari hubungan diplomatik, karena dengan adanya proses diplomatik yang sesuai, maka konflik antar negara dapat diminimalisir sehingga masyarakat internasional dapat merasakan ketertiban dunia.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan permasalahan yang di teliti ini antara lain:

1. Pemerintah Iran harusnya bisa menambah mitra dagang untuk memperluas area ekspor hasil pertanian dan mengantisipasi terjadinya kembali AS memberikan sanksi larangan barang mewah pada Iran yang berdampak turunnya nilai rial karena sanksi dan pasar mata uang domestik.
2. Iran juga disarankan agar mengembangkan sektor lain selain minyak untuk menopang pendapatan negara mereka. Sebab menggantungkan sumber pendapatan negara pada satu sektor bukanlah kebijakan yang baik untuk jangka panjang terlebih minyak merupakan primary product yang rentan karena bergantung pada ketentuan perdagangan dan harga minyak global yang berubah-ubah.
3. Harusnya Dewan Keamanan PBB menyerukan dialog dan langkah-langkah untuk mengakhiri ketegangan persesteruan antara Amerika Serikat dan Iran, dan Anggota dewan bisa mendesak agar perbedaan harus di atasi secara damai dan melalui dialog.

**Daftar Pustaka**

Abd. Hamid Kolil, 2015 *Diplomasi Pemerintah Iran Dalam Menghadapi Tekanan Internasional Pada Program Pengembangan Nuklir* *Tahun 2005-2009*, Universitas Jember. Tersedia di

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61498> diakses pada 20 Oktober 2019

Ardison Muhammad,2010, *Iran-EU Agreement on Nuclear Program*, tersedia di

<http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/eu_iran14112004.shtml>

<http://iranprimer.usip.org/resource/timeline-irans-nuclear-activities>, diakses pada 19 Oktober 2019

A. R. Jafarzadeh, 2007, *The Iran Threat: President Ahmadinejad and the Coming Nuclear Crisis. New York: Palgrave Macmillan.* tersedia di seahipaj.org/journals-ci/dec 2015/IJISSHR/full/IJISSHR-D-4-2015.pdf, diakses pada 19 Oktober 2019

Nuclear overview, http ://nti.org/e\_research/profiles/Iran/1819.html. diakses pada 19 februari 2019

Ed Haas, 2006 *U.S. Endorsed Iranian Plans to Build Massive Nuclear Energy Industry, GLOBAL RES*. tersedia di http://www.globalresearch.ca/u-s-endorsediranian-plans-to-build-massive-nuclear-energyindustry/2067. diakses pada 19 Oktober 2019

Mahdieh Aghazadeh, 2014, *International Sanction and Their Impacts on Iran‟s Economy, Fatih University*, tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Daftarnegaradengansenjatanuklir.html>

https://brainly.co.id/tugas/20014134, diakses 5 Februari 2019

Mohamad Rosyidin, E. Fitrah, 2016, *Sanksi Ekonomi: Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional, Yogyakarta: Pustaka Ilmu , Robert Eyler,op.cit,hal,* tersedia di

http://www.sobiad.org/ejournals/journal\_ijef/archieves/IJEF-2014\_2/Mahdieh-Aghazadeh.pdf, diakses 4 Februari 2018

nti.org*,* 2017*. Nuclear overview*, tersedia di http ://nti.org/e\_research/profiles/Iran/1819.html. diakses pada tanggal 19 februari 2017

Pratama Aji .1975 “*The Annual Report for 1992” International Atomic Energy gency*,

Pratama Aji. “Anne Hassing Cahn, Determinats of the Nuclear Proliferation inthe near – nuclear countries (Cambridge : Balinger Publishing Co. 1975). Hlm 186 national security achive , 1969, “Proposed Agreement For Coorporation Between the US Goverment and the Goverment of Iran Concerning the civil uses of otomic Energy “. tersedia di *http : www.nsarchive.chadwyk.com*. diakses pada 19 Oktober 2019

Robert Eyler, 2007, *Economic Sanctions: International Policy and Political Economy at Work, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 4-5 Johan Galtung, On the Effects of International Economic Sanction: With Examples from the Case of Rhodesia, World Politics, Vol 19 Issue 3 (April 1976), hlm. 379*, tersedia di http://web.stanford.edu/class/ips216/Readings/galtung\_67.pdf, diakses pada 4 Februari 2020

Shreeya Sinha, 2016 *Timeline on Iran’s Nuclear Program*, tersedia di https://www.nytimes.com/interactive/2014/11/20/world/middleeast/Iran- cleartimeline.html?\_r=0, diakses pada 19 Februari 2017

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, UniversitasMulawarman. E-mail : ladies.lathifah16@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)